

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah. Laporan Kinerja sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden untuk selanjutnya perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso.

Adapun Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah ini adalah untuk Pertanggungjawaban hasil, proses sampai dengan input dan peningkatan kinerja melalui umpan balik.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan

memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2018 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) BPBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2017.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kabupaten Bondowoso didasarkan atas perundang – undangan yang berlaku, yaitu :

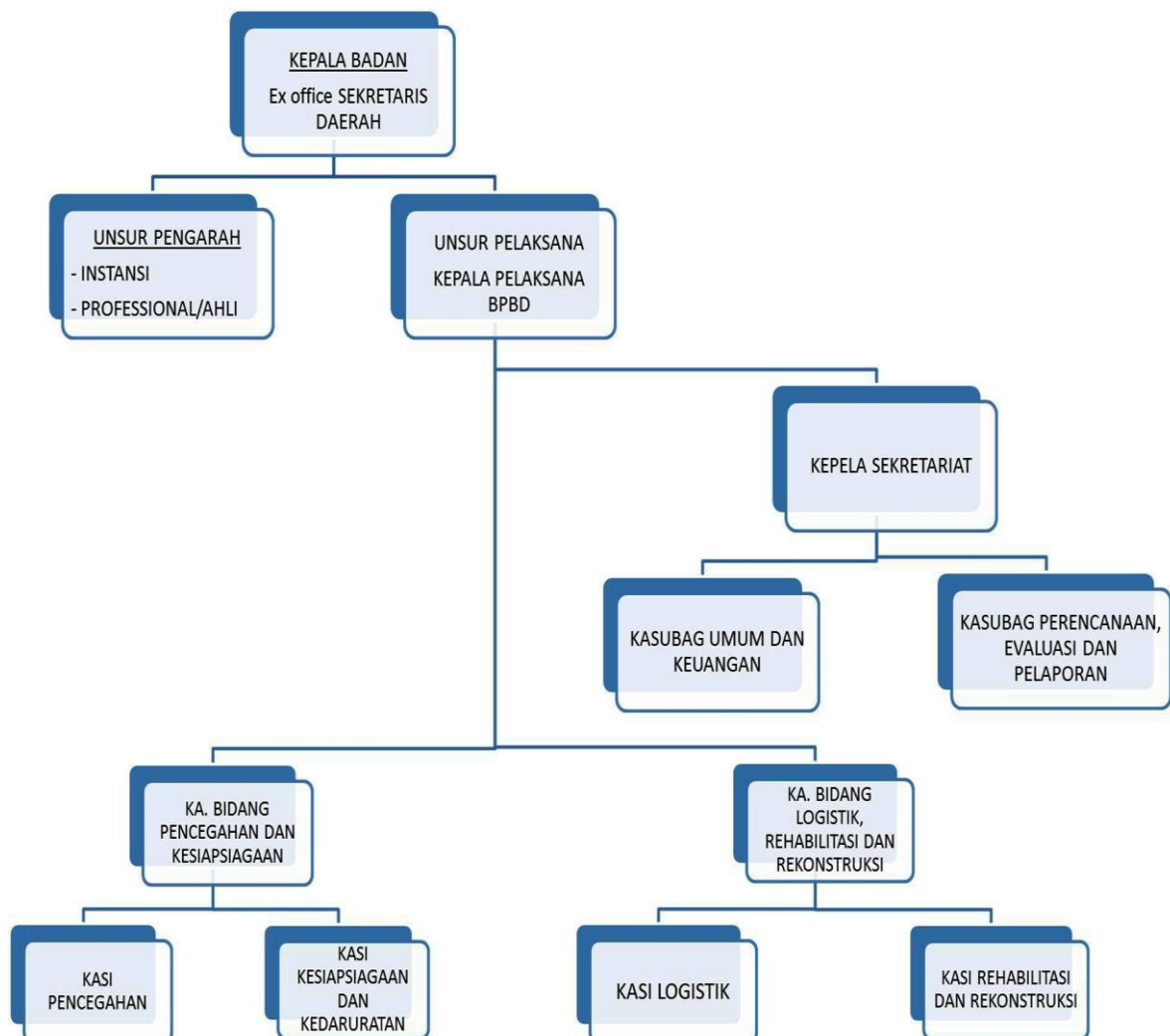
1. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 . IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Undang – Undang No. 24 / 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1.4. Struktur dan Tata Kerja Organisasi

1.4.1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (BPBD) berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, sebagai SKPD yang khusus membidangi penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bondowoso;

1.4.2. Struktur Organisasi



1.4.3. Susunan Kepegawaian

1. KEPALA BADAN

Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah

2. UNSUR PENGARAH

3. UNSUR PELAKSANA, terdiri dari :

➤ KEPALA PELAKSANA

➤ SEKRETARIAT

- a. Kepala Sekretariat
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

➤ *BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN*

- a. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- b. Kepala Seksi Pencegahan
- c. Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan

➤ *BIDANG LOGISTIK, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI*

- a. Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- b. Kepala Seksi Logistik
- c. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso sebanyak 39 orang terdiri dari 24 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 15 orang tenaga sukarelawan dengan komposisi sebagai berikut :

1) Kualifikasi Pendidikan

- Sarjana (S2)	=	4	orang
- Sarjana (S1)	=	8	orang
- SLTA	=	11	orang
- SLTP	=	1	orang
- SD	=	1	orang
Jumlah	=	25	orang

2) Pangkat dan Golongan

Pangkat/ Golongan													
I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
-	-	1	-	-	6	3	-	3	3	4	2	2	1

3) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Jumlah pejabat Struktural :

- Eselon II.B sebanyak 1 orang
- Eselon III.A sebanyak 1 orang
- Eselon III.B sebanyak 2 orang
- Eselon IV.A sebanyak 6 orang

b. Jumlah pejabat Fungsional: -

1.4.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1.4.4.1. Kedudukan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (BPBD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Urusan Penanggulangan Bencana sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. BPBD berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai SKPD yang khusus membidangi penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bondowoso
- c. BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati sedangkan pelaksanaan tugas operasional dilakukan oleh Kepala Pelaksana Badan yang dijabat oleh Pejabat Eselon II.

1.4.4.2. Tugas pokok dan fungsi

1). KEPALA

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana daerah.

2). UNSUR PENGARAH :

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberi masukan dan saran kepada Kepala dalam penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas, unsur pengarah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;
- b. Pemantauan penanggulangan bencana;
- c. Pengevaluasian dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3). UNSUR PELAKSANA, terdiri dari :

➤ KEPALA PELAKSANA

Tugas Pokok :

Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Fungsi :

- Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

➤ SEKRETARIAT

a. Kepala Sekretariat

Tugas Pokok :

Kepala Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerja sama.

Fungsi :

- Pengkoordinasian sinkronisasi dan integrasi di Lingkungan BPBD.
- Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan Teknis BPBD.
- Pembinaan dan Pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD.
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD.
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

b. Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan

Tugas Pokok :

- Melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD.
- Melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol di Lingkungan BPBD.
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD.
- Mengkoordinasikan, sinkronisasi dan integrasi di Lingkungan BPBD.

c. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Pokok :

- Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Lingkungan BPBD.
- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

➤ **BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN :**

a. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, pada saat tanggap darurat dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat.
- Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat.
- Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- Mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang kebijakan umum penanggulangan bencana pada prabencana, saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan pemberdayaan masyarakat.

b. Kepala Seksi Pencegahan

Tugas Pokok :

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana.
- Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- Melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, Evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di penanggulangan bencana pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

c. Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan

Tugas Pokok :

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- Melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksana kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.

- Melakukan penyiapan bahan komando pelaksanaan penanggulangan pada tanggap darurat.
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.

➤ ***BIDANG LOGISTIK, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI :***

a. Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Fungsi :

- Pelaksana Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana, dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pelaksanaan Penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum, penyediaan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik, peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

b. Kepala Seksi Logistik

Tugas Pokok :

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Penyiapan bahan pemantuan, evaluasi, analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

1.5. Permasalahan Utama

Dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran ada beberapa permasalahan yang dihadapi baik faktor internal maupun eksternal antara lain :

- a. Jumlah kendaraan, peralatan dan jumlah personil TRC (tim Reaksi Cepat) yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dilayani;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
- c. Bentang atau jangkauan pelayanan yang cukup luas.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mengatasi dan atau meminimalisir kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Secara intensif memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana langsung ke masyarakat, maupun sosialisasi melalui media masa, cetak dan radio;
- b. Mengoptimalkan jangkauan pelayanan yang luas dengan senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lintas SKPD, Muspida, Muspika dan Pemerintah Desa.

1.6. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Struktur dan Tata Kerja Organisasi
- 1.5. Permasalahan Utama
- 1.6. Sistematika Penulisan LKIP

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis Tahun (n) s/d (n+4)
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun Lalu
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun Lalu
- 2.4. Metode dan skala pengukuran kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Dan ANGGARAN

3. 1. Capaian Kinerja Organisasi
3. 2. Pagu dan Realisasi anggaran Organisasi

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK)
2. Penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir
3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso Timur adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Bupati Bondowoso. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dan secara *de facto* berdiri pada tanggal 3 Januari 2011. Tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Timur urusan penanggulangan bencana daerah berdasarkan asas otonomi dan Pembantuan di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, dan bidang Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2014 s/d 2018

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Menurunkan Resiko Bencana	Menurunnya Kerentanan dan Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Mitiasi Kebencanaan	1. Memenuhi Kebutuhan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran 2. Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, dan Rasa Aman Masyarakat

2.2. Rencana Kinerja Tahun Lalu

Tabel 2.2a
Sasaran dan Program

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penanggulangan Bencana Yang Tangkas dan Terampil	➤ % Tim Satuan Tugas Yang Terlatih Penanggulangan Bencana	1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	
	➤ % jumlah masyarakat yang memahami pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		

2. Terlaksananya Penyelamatan, Evakuasi dan Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Korban Bencana	➤ % Kejadian Darurat Bencana yang tertangani	2) Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana	
	➤ % Korban bencana yang memperoleh bantuan logistik bencana		
3. Terbangunnya Kemitraan Antar stake Holder Penanggulangan Bencana	➤ % Kerusakan Sarana dan Prasarana akibat bencana yang direhabilitasi	3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
	➤ % Kerusakan berat Sarana dan Prasarana akibat bencana yang direkonstruksi		

Tabel 2.2b
Program dan Kegiatan

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana		Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Terlaksananya Penyuluhan dan Simulasi PB
		Pelatihan Ketrampilan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Terlaksananya Keterampilan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana
		Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
		Pembentukan Siswa Tanggap Bencana	Pembentukan Kelompok Kerja Siswa Tanggap Bencana pada Siswa SMA, SMK Sederajat
		Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Gladi Lapang Penanggulangan Bencana
		Koordinasi Dan Legislasi Penanggulangan Bencana	Tersusunnya Peraturan Daerah Penyelenggara Penanggulangan Bencana
		Mitigasi structural pencegahan bencana	Terlaksananya Mitigasi structural pencegahan bencana
2. Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam Tanggap Darurat	Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Korban bencana Dalam Tanggap Darurat
		Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Alam	Tersedianya Pengadaan Peralatan PB dan sarana air bersih

		Mobilitas Dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Logistik Bencana	Terlaksananya Mobilitas dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Logistik Bencana
3.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Rusak Pasca Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Rusak Pasca Bencana

3.1. Perjanjian Kinerja Tahun Lalu

Tabel 2.3a
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2017
1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penanggulangan Bencana Yang Tangkas dan Terampil	➤ % Tim Satuan Tugas Yang Terlatih Penanggulangan Bencana	100 %
	➤ % jumlah masyarakat yang memahami pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	47,83 %
2. Terlaksananya Penyelamatan, Evakuasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana	➤ % Kejadian Darurat Bencana yang tertangani	85 %
	➤ % Korban bencana yang memperoleh bantuan logistik bencana	100 %
3. Terbangunnya Kemitraan Antar stake Holder Penanggulangan Bencana	➤ % Kerusakan Sarana dan Prasarana akibat bencana yang direhabilitasi	53,33 %
	➤ % Kerusakan berat Sarana dan Prasarana akibat bencana yang direkonstruksi	60 %

Tabel 2.3b
Indikator Kinerja Individu (IKI)

No	Program	Indikator Kinerja Individu	Target Tahun 2017
1	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana		
	Mitigasi	% Penduduk yang memahami Mitigasi bencana	$\frac{1650}{3450}$
		% Jumlah Mitigasi Struktural Yang	$\frac{10}{10}$

		Tertangani	
2	Tanggap Darurat dan Logistik Bencana		
	Tanggap Darurat Bencana	% jumlah bencana yang tertangani	100 %
3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	% Kerusakan Pasca Bencana yang di Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100 %

Tabel 2.3c
Tujuan Dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2017
Menurunkan Resiko Bencana	Indek Resiko Bencana	132,8

3.2. Metode dan Skala Pengukuran Kinerja

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Skala Penilaian Kinerja

Standar penilaian kinerja untuk setiap indikator kinerja menggunakan interpretasi penilaian pengukuran dengan skala ordinal, sebagai berikut :

Standart Penilaian Kinerja

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA dan ANGGARAN

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Akuntabilitas Kinerja Kegiatan

a. Capaian Kinerja Kegiatan

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kegiatan	Realisasi		Tahun 2017			Target RPJMD 2018
		2015	2016	Target	Realisasi	Capaian	
1	Jumlah kelengkapan surat menyurat yang terpenuhi	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 %	
2	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan komunikasi	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	100 %	3 Jenis
3	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang terpenuhi	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100 %	5 Orang
4	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang terpenuhi	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100 %	176 kali
5	Jumlah kebutuhan ATK yang terpenuhi	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	100 %	30 Jenis
6	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100 %	12 Jenis
7	Jumlah alat listrik dan elektronik yang terpenuhi	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100 %	22 Jenis
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						17 Jenis
9	Jumlah bahan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Jenis

	bacaan yang terpenuhi						
10	Jumlah makan dan minum yang terpenuhi	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 %	16 kali
11	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	1 tahun	1 tahun	100 %	120 kali
12	Jumlah pelaksana administrasi teknis yang terpenuhi	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100 %	10 Orang
13	Jumlah penyampaian informasi kepada masyarakat yang terpenuhi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 kali
14	Jumlah sarana prasarana gedung/kantor yang terpenuhi	9 Jenis	1 Jenis	1 unit	1 unit	100 %	4 Jenis
15	Jumlah mebeleur yang terpenuhi		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	2 Jenis
16	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang terpenuhi	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100 %	4 Paket
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	21 unit	21 unit	19 unit	19 unit	100 %	2 Jenis
18	Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Keja Lapangan			40 stel	40 stel	100 %	
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Eks	15 Eks	15 Eks	15 Eks	100 %	
20	Penyusunan Pelaporan	20 Eks	15 Eks	15 Eks	15 Eks	100 %	

	Keuangan						
21	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Badan Yang Disusun Tiap Tahun (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA, LPPD, LKPJ, LKIP, SAKIP, dan Renstra)						11 Dok
22	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset Yang Disusun Tiap Tahun (Prognosis dan Akhir Tahun)						2 Dok
23	Terlaksananya Penyuluhan dan Simulasi Penanggulangan Bencana	15 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	100 %	
24	Terpenuhinya Petugas PMK yang Terlatih Dalam Penanganan Bencana	100 Org	115 Org				
25	Terlaksananya Pelatihan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Pada Relawan Tanggap Bencana	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	100 %	6 Kali
26	Terbentuknya Satuan Tugas Masyarakat Tangguh Bencana	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	100 %	8 Desa

	Pada Tingkat Desa						
27	Terbentuknya Kelompok Kerja Siswa Tanggap Bencana	350 Org	300 Org	300 Org	300 Org	100 %	500 Org
28	Kemampuan Masyarakat Dalam Menyelamatkan Diri Menghadapi Bencana	6 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100 %	
29	Terlaksananya Penyuluhan Dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kepada Aparat Desa Di Wilayah Kab Bondowoso	3 Keg / (100 Org)					
30	Tersusunnya Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Bencana dan Database Bencana	100 Buku					
31	Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor dan Kekeringan	100 Buku	100 Buku				
32	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota/Perkotaan Bondowoso		1 jenis				
33	Tersusunnya Peraturan daerah Penyelenggara Penanggulangan Bencana			1 dok	1 dok	100 % (perda no 15 th 2017)	
34	Terlaksananya			1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan

	Mitigasi Struktural Pencegahan Bencana			(2paket)	(2paket)		(1paket)
35	Terpenuhinya Kebutuhan Minimal Masyarakat Korban Bencana Dalam Masa Tanggap Darurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 % (sembako 438 paket, tendon 1i unit, Air bersih 350.000 ltr)	100 %
36	Tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana yang Memadai	3 Unit	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	1 jenis
37	Terpenuhinya Kebutuhan Perawatan Peralatan Logistik Bencana	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100 %	15 jenis
38	Terlaksanannya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Rusak Pasca Bencana			53,33	100 %	187,50	100 %

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp 277.400.000,- dan terealisasi Rp 265.872.000,- atau sebesar 95,84 % digunakan untuk penyuluhan dan simulasi penanggulangan bencana di 8 lokasi yang rawan/potensi bencana dan sosialisasi kepada aparat desa se Kabupaten Bondowoso serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana serta langkah-langkah yang harus dilakukan jika bencana benar-benar terjadi;
2. Pelatihan Ketrampilan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana, dengan anggaran sebesar Rp 364.275.000,- dan terealisasi Rp 323.024.500,- atau sebesar 88,68 % digunakan untuk meningkatkan ketrampilan dan kesiapsiagaan relawan tanggap bencana sebanyak 720 orang;

3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan anggaran sebesar Rp 446.225.000,- dan terealisasi Rp 422.000.000,- atau sebesar 94,57 % digunakan untuk pembentukan satuan tugas masyarakat tangguh bencana pada tingkat desa dan bantuan alat komunikasi di 10 desa rawan/potensi bencana alam. ;
4. Pembentukan Siswa Tanggap Bencana dengan anggaran sebesar Rp 173.350.000,- dan terealisasi Rp 169.885.000,- atau sebesar 98 % digunakan untuk pembentukan kelompok kerja siswa tanggap bencana pada siswa SMA / SMK sederajat dan diikuti oleh 300 orang siswa;
5. Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebanyak Rp 122.425.000,- dan terealisasi Rp 120.519.000,- atau sebesar 98,44 % digunakan untuk melaksanakan gladi lapangan penanganan Erupsi Gunung Raung di 4 desa.
6. Koordinasi dan Legislasi Penanggulangan Bencana Rp. 100.000.000,- dan terealisasi Rp 88.934.500,- atau sebesar 88,93 % untuk menyusun Peraturan daerah Penyelenggara Penanggulangan Bencana;
7. Mitigasi structural Pencegahan bencana dengan anggaran sebesar 499.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 481.695.000,- atau sebesar 94,89 % untuk pembuatan Pembuatan Plengsengan Penahan Longsor dan pembuatan bangunan sarana air bersih;
8. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Tanggap Darurat, dengan anggaran sebesar Rp 604.282.500,- dan terealisasi Rp 599.957.350,- digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat korban bencana dalam tanggap darurat selama kurun waktu 1 tahun, diantaranya melalui penyaluran bantuan sembako dan bantuan uang tunai kepada korban bencana serta mendistribusikan air bersih ke desa yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih;
9. Pengadaan Peralatan Penanganan Bencana Alam dengan anggaran sebesar Rp 812.975.000,- dan terealisasi Rp 771.4069.36,-. digunakan untuk pengadaan peralatan penanggulangan bencana guna meningkatkan pelayanan dalam penanggulangan bencana;
10. Mobilitas dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Logistik Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 50.550.000,- dan terealisasi Rp 45.598.000,-digunakan untuk pemeliharaan peralatan logistik bencana alam, juga untuk meningkatkan pelayanan dalam penanggulangan bencana.

3.1.2 Akuntabilitas Kinerja program

a. Capaian Kinerja program

Tabel 3.2
Capaian Kinerja program

No	Indikator program	Realisasi		Tahun 2017			Target RPJMD 2018
		2015	2016	Target	Realisasi	Capaian	
1	% Tim Satuan Tugas Yang Terlatih Penanggulangan Bencana	100 %	50 %	100 % 1 Tim	100 % 1 Tim	100 %	
2	% Jumlah anggota masyarakat yang memahami pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	291,30 %	33,33 %	$\frac{1650}{3450}$ =47,83 %	$\frac{4400}{3450}$ =127,53 %	266,63 %	
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/ Kota	16,94 %	11,29 %				
4	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Penanganan Bencana Kebakaran	80 %	10 %				
5	% Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	80 %	70,83 %				
6	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000 - 5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	20 %	20 %				
7	% Penduduk yang memahami Mitigasi bencana						$\frac{3450}{3450}$
8	% Jumlah Mitigasi Struktural Yang Tertangani						$\frac{10}{10}$
9	% Kejadian Darurat Bencana yang tertangani	73,33 %	68,33 %	$\frac{51}{60}$ =85%	$\frac{85}{60}$ =141,67%	166,67 %	

10	% Korban bencana yang memperoleh bantuan logistik bencana	124,34 %	85,79 %	$\frac{345}{345}$ =100%	$\frac{362}{345}$ =104,93%	104,93 %	
11	% jumlah bencana yang tertangani						100 %
12	% Kerusakan Berat Sarana Dan Prasarana Rusak Akibat Bencana Yang Direkonstruksi % Kerusakan Berat Sarana Dan Prasarana Rusak Akibat Bencana Yang Direkonstruksi			53,33 %	100 %	187,50	
13	% Kerusakan Pasca Bencana yang di Rehabilitasi dan Rekonstruksi			60 %			
14	% Kerusakan Pasca Bencana yang di Rehabilitasi dan Rekonstruksi						100 %
15	Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana rusak pasca bencana				8 paket konstruksi	100 %	

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja program

Dalam rangka Meningkatkan Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat, Dan Terpadu di Kabupaten Bondowoso, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui program penanganan bencana pada waktu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

3.1.3. Akuntabilitas Kinerja Sasaran

a. Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Realisasi		Tahun 2017			Target RPJMD 2018
		2015	2016	Target	Realisasi	Capaian	
1	% Tim Satuan Tugas Yang Terlatih Penanggulangan Bencana	100 %	50 %	100 %	100 %	100 %	
2	% Jumlah anggota masyarakat yang memahami pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	291,30 %	33,33 %	47,83 %	127,53 %	266,63 %	
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/ Kota	16,94 %	11,29 %				
4	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Penanganan Bencana Kebakaran	80 %	10 %				
5	% Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	80 %	70,83 %				
6	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000 - 5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	20 %	20 %				
7	% Kejadian Darurat Bencana yang tertangani	73,33 %	68,33 %	51	51	100 %	
10	% Korban bencana yang memperoleh bantuan logistik bencana	124,34 %	85,79 %	345	438	126,96 %	
11	%Kerusakan Berat Sarana Dan Prasarana Rusak Akibat Bencana Yang			53,33 %	100 %	187,50	

	Direkontruksi% Kerusakan Berat Sarana Dan Prasarana Rusak Akibat Bencana Yang Direkontruksi						
12	% Kerusakan Pasca Bencana yang di Rehabilitasi dan Rekonstruksi			60 %			
13	Persentase Desa Tangguh Bencana Madya						10 %

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Untuk mencapai target capaian kinerja sasaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (BPBD) melakukan perwujudan kesadaran, kesiapsiagaan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat, daerah dan desa.

3.1.4. Akuntabilitas Kinerja Tujuan

a. Capaian Kinerja Tujuan

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan

Indikator Tujuan	Realisasi		Tahun 2017			Target RPJMD 2018
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian	
Indek Resiko Bencana			133,6			125,25

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Komitmen Pemerintah dan masyarakat terkait pennggulangan bencana disuatu daerah sudah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum

menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negative dari bencana.

3.1.5. Permasalahan dan Solusi Capaian Kinerja Organisasi

Permasalahan yang sering dihadapi dalam penanggulangan bencana antara lain :

- a. Jumlah kendaraan dan jumlah personil TRC yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dilayani;
- b. Panjangnya alur pencairan bantuan uang tunai untuk korban berakibat pada kurang cepatnya penyampaian bantuan kepada korban bencana, sehingga penyederhaan prosedur sangat diperlukan;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
- d. Bentang atau jangkauan pelayanan yang cukup luas.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mengatasi dan atau meminimalisir kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai anggaran yang diberikan kabupaten;
- b. Secara intensif memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana langsung ke masyarakat, maupun sosialisasi melalui media masa, cetak dan radio;
- c. Mengoptimalkan jangkauan pelayanan yang luas dengan senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lintas SKPD, Muspida, Muspika dan Pemerintah Desa.

3.2. Pagu dan Realisasi Anggaran Organisasi

Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	411.000.000,00	383.959.009,00	93,42
1	Penyediaan Surat Menyurat	1.000.000,00	558.600,00	55,86
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	31.800.000,00	16.909.600,00	53,17
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.500.000,00	7.145.000,00	95,27
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	12.898.550,00	85,99
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	8.410.000,00	93,44
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.500.000,00	15.022.500,00	96,92
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	656.000,00	32,80
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.000.000,00	2.625.000,00	37,50
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	249.600.000,00	247.228.759,00	99,05
11	Penyedia jasa tenaga pendukung administrasi/ tehnis perkantoran	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00
12	Penyediaan informasi hasil aparatur kepada masyarakat	15.000.000,00	14.905.000,00	99,37
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	540.450.000,00	466.030.650,00	86,23
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	109.400.000,00	99.952.800,00	91,36
2	Pengadaan mebelleur	71.500.000,00	67.000.000,00	93,71
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	8.750.000,00	8.250.000,00	94,29
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	350.800.000,00	290.827.850,00	82,90

III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000,00	19.624.000,00	98,12
1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	20.000.000,00	19.624.000,00	98,12
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000,00	2.938.500,00	97,95
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	1.462.500,00	97,50
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	1.500.000,00	1.476.000,00	98,40
V	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.983.375.000,00	1.871.930.000,00	94,38
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	277.400.000,00	265.872.000,00	95,84
2	Pelatihan Ketrampilan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	364.275.000,00	323.024.500,00	88,68
3	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	446.225.000,00	422.000.000,00	94,57
4	Pembentukan Siswa Tanggap Bencana	173.350.000,00	169.885.000,00	98,00
5	Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	122.425.000,00	120.519.000,00	98,44
6	Koordinasi dan Legislasi Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	88.934.500,00	88,93
7	Mitigasi Struktural Pencegahan Bencana	499.700.000,00	481.695.000,00	96,40
VI	Program Tanggap Darurat dan Logistik Bencana	1.467.807.500,00	1.416.962.286,00	96,54
1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dalam Tanggap Darurat	604.282.500,00	599.957.350,00	99,28
2	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Alam	812.975.000,00	771.406.936,00	94,89
3	Mobilitas dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Logistik Bencana	50.550.000,00	45.598.000,00	90,20
VII	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	9.000.000.000,00	8.745.600.300,00	97,17
1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Rusak Pasca Bencana	9.000.000.000,00	8.745.600.300,00	97,17
	JUMLAH :	13.425.632.500,00	12.907.044.745,00	96,14

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso (BPBD) berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 14 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai SKPD yang khusus membidangi penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bondowoso. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah : ” TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BONDOWOSO “. Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut maka misi yang ditetapkan adalah : ” MENINGKATKAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA CEPAT, TEPAT, DAN TERPADU ”.

Alokasi anggaran yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2017 sebesar Rp 14.878.310.400,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) Rp 1.452.677.900,- dan Belanja Langsung (Belanja Program Kegiatan) Rp Rp 13.425.632.500,-. Sedangkan realisasinya sampai dengan 31 Desember 2017 khusus untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 12.907.044.745,- (96,14 %).

Langkah-langkah penanggulangan bencana yang telah dilakukan yaitu :

- a. Memberikan sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat dan simulasi penanggulangan bencana;
- b. Memberikan pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana kepada para relawan penanggulangan bencana;
- c. Berkoordinasi dan bersinergi dengan para Stake Holder penanggulangan bencana diwilayah Kabupaten Bondowos, BPBD Propinsi Jawa timur dan BNPB;
- d. Segera turun ke lapangan setelah memperoleh informasi kejadian bencana;
- e. Menyalurkan bantuan sembako dan bantuan uang tunai kepada korban bencana.

Dalam hal penanggulangan bencana kekeringan pada musim kemarau telah didistribusikan bantuan air bersih kepada desa-desa yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih.

Panjangnya alur pencairan bantuan uang tunai untuk korban berakibat pada kurang cepatnya penyampaian bantuan kepada korban bencana, sehingga penyederhaan prosedur sangat diperlukan; kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;

bentang atau jangkauan pelayanan yang cukup luas. Atas kendala dan tantangan yang dihadapi sudah dan sedang dilangkah-langkah pemecahan masalah dalam bentuk : mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai anggaran yang diberikan kabupaten, secara intensif memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana langsung ke masyarakat, maupun sosialisasi melalui media masa, cetak dan radio, mengoptimalkan jangkauan pelayanan yang luas dengan senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lintas SKPD, Muspida, Muspika dan Pemerintah Desa.

B. SARAN

Untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya perlu dilakukan perbaikan atas kekuarang-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas tahun 2017 untuk itu disarankan :

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya pencegahan bencana dan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga semua pihak terkait dapat bersinergi dalam penanggulangan bencana.
4. Menyusun perencanaan yang komperhensif dalam hal pemetaan potensi daerah rawan bencana serta rencana aksi yang harus dilakukan.

Bondowoso, Maret 2018

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

Ir. KUKUH TRIYATMOKO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610217 199203 1 004

bentang atau jangkauan pelayanan yang cukup luas. Atas kendala dan tantangan yang dihadapi sudah dan sedang dilangkah-langkah pemecahan masalah dalam bentuk : mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai anggaran yang diberikan kabupaten, secara intensif memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana langsung ke masyarakat, maupun sosialisasi melalui media masa, cetak dan radio, mengoptimalkan jangkauan pelayanan yang luas dengan senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lintas SKPD, Muspida, Muspika dan Pemerintah Desa.

B. SARAN

Untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya perlu dilakukan perbaikan atas kekuarang-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas tahun 2017 untuk itu disarankan :

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya pencegahan bencana dan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga semua pihak terkait dapat bersinergi dalam penanggulangan bencana.
4. Menyusun perencanaan yang komperhensif dalam hal pemetaan potensi daerah rawan bencana serta rencana aksi yang harus dilakukan.

Bondowoso, Februari 2018



**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

Ir. KUKUH TRIYATMOKO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610217 199203 1 004